

ARKEOLOGI PULAU-PULAU TERDEPAN DI MALUKU

Suatu Tinjauan Awal

Marlon NR Ririmasse

Balai Arkeologi Ambon

Jl. Namalatu-Latuhalat Ambon 97118

Email: balar.ambon@yahoo.co.id

Abstrak

Pulau-pulau Terdepan adalah salah satu isu utama dalam pengelolaan wilayah negara selama dekade belakangan. Keletakan pulau-pulau ini yang berada pada ranah terdepan menjadikan perannya strategis dalam pengelolaan batas-batas negara. Ragam insiden dan sengketa batas wilayah dengan beberapa negara tetangga merupakan cermin bahwa pengelolaan wilayah perbatasan masih jauh dari yang diharapkan. Pengelolaan pulau-pulau terdepan kiranya merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan profil batas wilayah yang kuat. Termasuk di dalam upaya ini adalah pengelolaan aspek budaya. Maluku dengan karakter geografinya yang khas sebagai wilayah kepulauan, juga dihadapkan pada tantangan serupa. Gugusan pulau terdepan di Maluku berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Makalah ini merupakan sebuah tinjauan awal terhadap arkeologi pulau-pulau terdepan di Maluku dan diskusi atas kemungkinan perannya dalam pengelolaan batas wilayah negara.

Kata Kunci: Pulau-pulau terdepan, Arkeologi, Maluku

Abstract

The Outermost islands is one of the main issues in the Indonesia boundaries management in the last decade. The geography of these islands which is located at the outermost parts of Indonesia has created the strategic role for these particular regions. Various incidents and disputes with the neighbouring countries is a reflection that boundaries management in Indonesia is still far from ideal. Therefore, the management of the outermost islands is a key factor in creating a strong state boundaries profile. To be including in this effort is the management of the cultural aspect. Maluku with its unique geographical characteristic is also face similar challenge. The outermost islands of in this region is also adjacent the region of several neighbouring countries. This paper deals with two main issues. Firstly, it is a preliminary review for the archaeology on the outermost islands in Maluku and secondly, it will discusses the possibility for archaeology to actively involve in the management of state boundaries

Keywords: Outermost Islands, Archaeology, Maluku

PENDAHULUAN

Beberapa bulan lalu hubungan Indonesia dan Malaysia sempat kembali memanas. Situasi ini dipicu insiden penangkapan tiga petugas DKP oleh kapal patroli Angkatan Laut Diraja Malaysia. Ketiga petugas ini memang kemudian dilepaskan disusul rentetan pertemuan bilateral yang digagas untuk menyelesaikan insiden dan mendiskusikan masalah perbatasan (laut) antara kedua negara. Kasus tapal batas laut ini kiranya bukan yang pertama terjadi dalam hubungan bertetangga Indonesia-Malaysia.

Selama beberapa tahun terakhir, kawasan Ambalat di laut Sulawesi juga menjadi wilayah panas dalam penentuan tapal batas kedua negara. Tercatat beberapa kali kapal perang dua bangsa ini sempat berhadap-hadapan meski tak sampai terjadi konflik senjata yang nyata. Menurut catatan TNI Angkatan Laut, sepanjang tahun 2007-2009 tercatat lebih dari seratus kali kapal, pesawat, dan tentara Angkatan Perang Diraja Malaysia melanggar dan memasuki wilayah Ambalat. Sengketa perbatasan di wilayah Ambalat kiranya tidak dapat dilepaskan dari persoalan potensi ekonomis yang terdapat di kawasan ini. Sebagai sebuah landas kontinen, Ambalat adalah blok laut kaya sumber daya dengan potensi kelola untuk minyak bumi mencapai 400 juta barrel dan 3,3 Triliun kubik untuk gas alam. Akar persoalan blok Ambalat sendiri sebenarnya bermula dari peristiwa penting dalam sejarah pengelolaan wilayah perbatasan di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 17 Desember 2002. Ketika itu, hakim ketua Gilbert Guillaume dari Prancis, yang memimpin International Court Justice, memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas dua pulau, Sipadan dan Ligitan, yang selama ini menjadi sengketa kedua negara.

Terdapat tiga alasan mengapa Indonesia kalah dalam kasus tersebut yaitu: konsistensi eksistensi Malaysia di pulau-pulau tersebut, penguasaan dan pemanfaatan efektif atas pulau-pulau dimaksud dan perlindungan serta pelestarian ekologis. Menyusul keputusan ini, Malaysia merasa memiliki hak untuk mengklaim dan mengelola sebagian blok Ambalat, yaitu blok ND 6 dan ND 7 yang kaya minyak dan bermuara pada sengketa baru atas tapal batas laut kedua negara. Lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan merupakan sebuah catatan penting dalam sejarah pengelolaan pulau-pulau di wilayah perbatasan Indonesia. Dimana menyusul keputusan ini, masalah pulau-pulau terdepan segera mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dipandang belum memberikan perhatian semestinya terhadap pengelolaan kawasan ini. Padahal ditinjau dari keletakannya sebagai pintu wilayah negara, pulau-pulau terdepan

rentan terhadap pengaruh luar baik mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan negara.

Persoalan pengelolaan pulau-pulau di wilayah perbatasan memang kompleks sifatnya. Banyak aspek yang harus dikelola secara harmonis untuk menciptakan profil batas wilayah yang kuat. Meski belum menghadapi persoalan sebagaimana di Ambalat, tantangan yang sama kiranya juga dihadapi Kepulauan Maluku. Sebagai propinsi yang juga memiliki gugus pulau-pulau terdepan di wilayahnya, Maluku dituntut untuk mampu secara tegas mengelola wilayah di tapal batas ini. Dalam kerangka dimaksud makalah ini mencoba mengulas dua hal: *pertama*, sepintas meninjau profil umum pulau-pulau terdepan di Kepulauan Maluku, *Kedua*, menimbang bahwa aspek sosial budaya merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan pulau-pulau terdepan, tinjauan awal atas arkeologi di kawasan perbatasan ini akan disajikan. Diharapkan kontribusi pada tahap mula ini bisa menjadi pertimbangan dalam diskusi tentang peran studi arkeologi dalam pengelolaan pulau-pulau terdepan.

Pulau-Pulau di Wilayah Perbatasan Indonesia: Terluar atau Terdepan?

Pulau-pulau terdepan sesungguhnya bukan merupakan istilah orisinil untuk menyebut gugus pulau di wilayah perbatasan. Pada awalnya, istilah yang digunakan dan menjadi acuan resmi pemerintah adalah pulau-pulau terluar. Hal ini nampak lewat keberadaan Peraturan Presiden No 78 tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang strategis secara posisi maupun ekonomi. Diterbitkannya Peraturan Presiden ini merupakan jawaban pemerintah untuk ragam sorotan masyarakat yang memandang pemerintah belum mengelola pulau-pulau di wilayah perbatasan secara baik, sebagaimana nampak dalam kasus lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan.

Penggunaan istilah pulau-pulau terdepan pertama kali diusulkan oleh guru besar Sejarah Universitas Indonesia, Susanto Zuhdi (Zuhdi, 2006). Dalam artikel yang ditulis di sebuah harian nasional terkemuka Zuhdi berargumen bahwa selain karena alasan strategis, istilah ‘terdepan’ lebih mewakili keletakan pulau-pulau ini di halaman terdepan negara. Zuhdi mengkritik istilah Pulau Terluar yang dianggap sebagai terminologi daratan dan bukan lautan. Kritik Zuhdi kemudian dijawab oleh Retraubun melalui harian yang sama (Retraubun, 2006). Menurut Retraubun, yang saat itu menjabat dirjen pulau-pulau kecil DKP, istilah Pulau Terluar kenyataannya tersirat dalam United Nations Convention On the Law of the Sea tahun 1982, diindonesiakan menjadi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Dalam pandangannya setidaknya ada tiga esensi penting yang dapat ditarik dari

konvensi ini sebagai penunjuk bahwa penggunaan istilah pulau-pulau terluar adalah relevan. Pertama, kata *outermost islands* yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi “pulau-pulau terluar” sebenarnya ada dalam sistem kelautan suatu negara kepulauan, termasuk Indonesia. Kedua, istilah *outermost islands/pulau terluar* adalah istilah baku secara internasional bagi negara berstatus negara kepulauan (Archipelagic State), termasuk Indonesia yang telah mengakui konvensi hukum laut ini. Ketiga, terminologi pulau terluar tidak dapat dihakimi sebagai istilah daratan karena bermakna penting dalam isu delimitasi maritim.

Lepas dari dinamika diskusi terminologi, usulan Zuhdi kiranya dapat dipahami. Dimana meski secara geografis berada pada halaman depan wilayah RI, pengelolaan pulau-pulau di wilayah perbatasan kiranya lebih mencerminkan perlakuan sebagai halaman belakang. Situasi ini ditunjukkan dengan kondisi masyarakat di pulau-pulau terdepan yang sebagian besar miskin, memiliki mutu pendidikan rendah, seringkali lebih banyak bekerja di negara tetangga terdekat, rawan pangan, prevalensi berbagai penyakit yang tinggi, terisolasi dari pusat pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di atas rata-rata. Sebagai upaya untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden 78/2005 sebagai kebijakan publik pertama yang mengatur wilayah perbatasan khususnya pulau terdepan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjawab isu kesenjangan pembangunan, penegakan hukum, dan batas maritim di pulau-pulau terdepan yang mau diwujudkan benar-benar sebagai halaman depan NKRI.

Kepulauan Maluku Tenggara: Rumah Pulau-Pulau Terdepan di Maluku

Terdapat hampir seratus pulau yang termasuk dalam daftar pulau terdepan menurut Peraturan Presiden 78/2005. Pulau-pulau ini berbatasan langsung dengan setidaknya sembilan negara tetangga mulai dari India di sebelah barat Aceh hingga Palau di utara Papua. Dari sembilan negara yang berbatasan langsung ini, himpunan terbesar yaitu 23 pulau berbatasan dengan Australia, dilanjutkan dengan Malaysia (22 pulau), India (13), Filipina (11), Timor Leste (10), Palau (7), Singapura (4), Vietnam (2), dan 1 pulau dengan Papua Nieuw Guinea. Ke-92 pulau ini tersebar di 18 propinsi mulai dari Nangroe Aceh Darussalam hingga Papua.

Dalam daftar panjang ini terdapat 19 pulau terdepan yang merupakan bagian dari Kepulauan Maluku. 1 (satu) pulau terletak di wilayah propinsi Maluku Utara dan 18 pulau lainnya terdapat di wilayah Propinsi Maluku. Pulau terdepan di Propinsi Maluku Utara, yaitu Pulau Jiwe, terletak di Laut Halmahera dan berbatasan dengan negara Palau. 18 Pulau lain terletak di Propinsi Maluku dan berbatasan dengan dua negara, yaitu Australia dan Timor Leste. Secara geografis himpunan pulau-pulau terdepan di propinsi Maluku ini merupakan bagian dari gugus kepulauan Maluku Tenggara.

Karakter setiap pulau dalam himpunan pulau terdepan inipun bervariasi adanya. Mereka berbeda dalam luas wilayah. Ada pulau yang hanya berupa pulau karang kosong yang menyembul di lautan dan ada pula pulau dengan wilayah cukup luas dan memiliki populasi cukup padat seperti Wetar dan Kisar. Dalam kaitannya dengan sejarah kawasan, ada pulau yang telah terekam dalam catatan sejarah budaya masa lalu pun kajian pada masa yang lebih kini, dan ada pulau yang sama sekali tidak dikenal sebelum muncul Peraturan Pemerintah No 07/2005. Ulasan makalah ini akan diarahkan pada gugus pulau-pulau terluar di wilayah Kepulauan Maluku Tenggara dengan pertimbangan populasi pulau-pulau terluar yang terkonsentrasi di kawasan ini dan rekam sejarah penelitian budaya yang telah dilakukan sebelumnya.

Maluku Tenggara adalah nama gugus kepulauan yang membentang lebih dari seribu kilometer antara Timor dan Papua. Secara geografis Kepulauan Maluku Tenggara dibatasi oleh Laut Banda di sebelah Utara dan Laut Timor serta Laut Arafura di sebelah selatan. Saat ini wilayah Maluku Tenggara terdiri dari himpunan gugus kepulauan yang bersama membentuk total daratan dengan luas mencapai 25.000 Km persegi. Terdapat beberapa kepulauan utama yang sudah cukup dikenal dalam wilayah luas ini. Kepulauan terbesar adalah Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Kei, dan Kepulauan Aru. Saat ini Kepulauan Maluku Tenggara terbagi dalam lima wilayah administrasi mencakup Kotamadya Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, dan yang masih dalam proses pembentukan adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Empat kelompok etnis utama hidup dalam gugus kepulauan Maluku Tenggara. Kelompok terbesar adalah masyarakat yang hidup di kepulauan Tanimbar, disusul oleh masyarakat Kepulauan Kei, dan Kepulauan Aru. Dibanding kepulauan lain, karakter sosial masyarakat di Kepulauan Kei lebih beragam. Mengingat wilayah ini juga telah lama dihuni kelompok pendatang yang berasal dari Banda, Ambon, Seram, Makassar, dan Bugis (Fox, 2000). Kelompok etnis yang keempat adalah masyarakat yang mendiami gugus pulau

sebelah barat Maluku Tenggara yang berbatasan dengan pulau Timor. Termasuk dalam gugus pulau ini adalah beberapa pulau seperti Wetar, Kisar, Leti, Luang dan Babar. Bahasa Austronesia digunakan secara luas di Kepulauan Maluku Tenggara. Rumpun bahasa Austronesia yang digunakan di wilayah ini tergolong dalam kelompok Central Malayo Polynesian (CMP) dan dibagi dalam 24 sub kelompok bahasa (de Jonge and van Dijk, 1995).

Sedikit yang bisa diketahui tentang sejarah Kepulauan Maluku Tenggara sebelum kedatangan Bangsa Eropa. Sumber-sumber sejarah klasik Nusantara, yang sering menyebut wilayah di luar Jawa, bahkan tidak menyinggung mengenai Kepulauan ini. Kondisi ini membuat catatan sejarah awal kawasan ini didapatkan dari sumber-sumber sejarah pada awal persentuhan dengan bangsa Eropa. Orang-orang portugis adalah bangsa Eropa yang pertama tiba di Kepulauan ini. Setelah tiba di Banda pertama kali pada tahun 1512, dominasi atas perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku dicapai pada penghujung abad ke-16 (LeBar, 1976). Jejak bangsa Portugis bisa diamati lewat keberadaan Benteng dan sisa struktur bangunan di pulau Kisar dan bagian timur Kepulauan Aru. Belanda mencapai Kepulauan Maluku Tenggara pada awal abad ke-17 dan pertama kali mendarat di bagian timur Kepulauan Kei dan Aru. Kedatangan Bangsa Belanda ini kemudian diikuti dengan dimulainya monopoli perdagangan dengan penduduk pribumi dan kendali penuh atas perdagangan cengkeh di kawasan ini. Meski dominasi perdagangan Belanda atas kawasan ini tidak terbantahkan, namun rekam sejarah juga menunjukkan intensitas tinggi perdagangan antar pulau dengan pedagang lokal dari Banda, Bugis, dan Makassar.

Catatan-catatan awal tentang Kepulauan Maluku Tenggara oleh Bangsa Eropa didapatkan dari administrator Belanda, Misionaris, Individu-individu yang terlibat dalam ragam ekspedisi, serta para ilmuwan (de Jonge and van Dijk, 1995). Setidaknya ada beberapa nama yang mengumpulkan catatan-catatan yang cukup akurat tentang kondisi kawasan ini di masa lalu. Nama pertama adalah ilmuwan terkenal Alfred Russel Wallace yang sempat melakukan perjalanan keliling di kawasan ini pada paruh kedua abad ke-19. Ilmuwan lain adalah etnolog Jerman, Wilhem Muller Wismar yang bertugas untuk *Museum fur Volkerkunde* di Berlin dan melakukan perjalanan di kawasan ini antara tahun 1913 dan 1914. Sepanjang perjalannya merekam data-data ilmiah dan aktif mendokumentasi kawasan lewat foto serta pengumpulan artefak utamanya tentang pulau-pulau di bagian barat Maluku Tenggara. Informasi tentang kondisi Maluku Tenggara di tiga dekade awal abad ke-20 diketahui lewat karya dan koleksi dua misionaris Katolik yaitu

Hendri Geurtjens dan Petrus Drabbe. Karya Geurtjens difokuskan pada Kepulauan Kei antara tahun 1903 hingga 1922 sementara Drabble bertugas di Kepulauan Tanimbar antara tahun 1915-1935. Di masa yang lebih kemudian, khususnya sejak awal tahun 1970-an, data studi budaya khususnya etnografi Maluku Tenggara tetap didominasi kelompok peneliti asing. Cecile Barraud, melakukan penelitian etnografi di Tanimbar Kei sejak tahun 1971 diikuti studi etnografi oleh Susan Mc Kinnon di Fordata, Kepulauan Tanimbar antara tahun 1979-1980. Tahun 1984 hingga 1986 Simmone Pauwells melakukan penelitian di pulau Selaru Kepulauan Tanimbar, sementara Spyer berfokus pada Kepulauan Aru antara tahun 1984-1986. Khusus untuk gugus pulau di bagian barat Maluku Tenggara, penelitian dilakukan oleh Sandra Pannell pada tahun 1986-1987 sementara de Jonge dan van Dijk melakukan penelitian di pulau Babar antara tahun 1981-1983.

Arkeologi Pulau-Pulau Terdepan di Maluku: Sebuah Tinjauan Awal

Berbeda dengan ragam penelitian etnografis yang telah disebutkan di atas, kajian arkeologis atas Maluku Tenggara dalam skala kawasan masih tergolong terbatas. Kondisi ini bisa dilihat dari minimnya publikasi (khususnya pada tingkat internasional) yang berhubungan dengan arkeologi Maluku Tenggara pada skala kawasan. Situasi serupa kiranya berlaku untuk kawasan Maluku secara keseluruhan. Lape (2000) melihat situasi ini sebagai situasi yang mengejutkan. Utamanya bila mempertimbangkan peran sentral Maluku dalam sejarah dunia khususnya dalam kaitan dengan sejarah perdagangan rempah-rempah. Profil sejarah budaya Maluku yang minim jejak arsitektur monumental dan sejarah tulisan diduga merupakan pertimbangan utama minimnya perhatian atas kawasan ini oleh para peneliti sejarah budaya. Lepas dari kondisi tersebut, faktor yang paling mempengaruhi situasi ini menurut Lape adalah kurangnya pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sesuai dengan karakter sejarah budaya Maluku sebagai satu kawasan. Kondisi ini kiranya telah dikoreksi kemudian oleh Spriggs (1998) dalam tulisannya *research questions in Maluku archaeology*.

Harus diakui bahwa penelitian arkeologi di kepulauan Maluku Tenggara agaknya terlambat dimulai dibandingkan dengan wilayah-wilayah disekitarnya. Sifat penelitian yang dilakukan juga sangat eksploratif dan sebagian besar hanya merupakan survei penjajakan untuk meninjau potensi arkeologis dalam kawasan. Kondisi ini dapat diamati melalui beberapa catatan atas penelitian arkeologi di Maluku Tenggara yang kiranya dapat disarikan. Penelitian arkeologi di Maluku Tenggara dimulai dengan pendekatan eksploratif

oleh beberapa peneliti asing seperti Ballard (1988;1992) yang meninjau lokasi situs lukisan cadas Dudumahan di Kei Kecil dan Spriggs dan Miller (1988) yang mengulas keberadaan temuan nekara Dong-Son di Letvuan Kei Kecil. Tahun 1995 Balai Arkeologi Ambon dibuka untuk menggiatkan kajian arkeologi di Kepulauan Maluku. Intensitas penelitian yang dilakukan meningkat menyusul kebijakan ini, namun penelitian arkeologi di wilayah Maluku Tenggara umumnya tetap dilaksanakan dalam kerangka kerja survei eksploratif (untuk rangkuman penelitian arkeologi oleh Balai Arkeologi Ambon di Maluku Tenggara lihat: Ririmasse, 2005; Ririmasse, 2007). Penelitian arkeologis (barangkali satu-satunya) dengan bobot yang signifikan di kawasan ini dilaksanakan oleh kolaborasi kelompok peneliti Australia-Indonesia di Kepulauan Aru antara tahun 1995-1998 (O'Connor *et.al.*: 2005). Fokus penelitian ini diarahkan pada beberapa isu sentral seperti jejak kolonialisasi maritim dan awal penghunian serta koneksi antar pulau pada masa Pleistosin dan awal Holosen; Jejak pertanian dan domestikasi hewan serta interaksi antara pemukim awal dan pemukim Austronesian, peran Kepulauan Aru sebagai pemasok bulu burung cendrawasih dan ragam produk hutan dan laut dalam kurun 2000 tahun. Hasil penelitian tiga musim ini telah diterbitkan dalam *The Archaeology of Aru Islands, Eastern Indonesia* (O'Connor *et.al.*, 2005). Menilik profil penelitian yang masih sedemikian terfragmentasi, rasanya terlalu dini untuk secara eksklusif meninjau arkeologi pulau-pulau terluar di Maluku Tenggara. Namun, sebagai sebuah kajian awal, dapatlah kiranya pulau-pulau di kawasan perbatasan ini ditinjau sejenak melalui beberapa rekam penelitian eksploratif yang telah dilakukan sebelumnya:

Kisar

Pulau Kisar adalah salah satu pulau terluar di Indonesia. Secara administratif pulau ini termasuk dalam wilayah kabupaten Maluku Barat Daya, kabupaten termuda di Propinsi Maluku. Penelitian di pulau ini dilakukan oleh tim penelitian Balai Arkeologi Ambon pada tahun 2005 (Ririmasse, 2006). Rekam hasil penelitian eksploratif di pulau ini didominasi oleh jejak budaya berciri colonial. Kondisi ini dapat dilihat dari keberadaan Benteng Vollenhaven (1665), Benteng Delleshaven (1667), Struktur bekas gereja (1790) dan bekas bangunan sekolah Belanda (1795). Keberadaan bangunan kolonial dalam jumlah lumayan ini sebenarnya merupakan sebuah peluang untuk meninjau lebih jauh peran Kisar dalam jaringan perdagangan pada awal masa kolonial. Perhatian lebih mendalam juga diperlukan untuk mengelola dengan baik

bangunan-bangunan ini. Sejauh ini belum ada rekam kronologi untuk situs-situs di Pulau Kisar.

Larat

Pulau Larat merupakan salah satu dari 92 pulau garda terdepan Nusantara. Di pulau ini, terdapat titik dasar yang menentukan batas wilayah laut Indonesia dengan Australia. Pulau kecil ini secara administratif merupakan daratan utama dari Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB). Untuk menuju Larat hanya dapat ditempuh melalui jalur laut, baik dari Ibukota MTB, Saumlaki, maupun kapal laut perintis dari Surabaya. Jika dari Saumlaki, terdapat dua perahu motor yang berkapasitas 20 dan 50 penumpang. Waktu tempuh antara Saumlaki-Larat sekitar 4-5 jam, tergantung cuaca di pesisir laut Pulau Yamdena, yang merupakan wilayah laut terbuka. Larat merupakan salah satu dari pulau-pulau kecil di Maluku yang indah. Pulau ini merupakan hasil dari bentukan karang, sehingga nampak datar dengan topografi yang tidak terlalu bergelombang. Dari asal namanya cukup menjelaskan, jika Larat dilihat dari laut nampak seperti suatu hamparan tanah datar yang memancarkan cahaya. Larat berasal dari kata Larit yang berarti cahaya. Penelitian arkeologi di Pulau ini dilaksanakan oleh Balai Arkeologi Ambon pada tahun 2001. Dalam survei penjajakan ini direkam dolmen yang masih berasosiasi dengan pemukiman penduduk serta gua dengan sebaran fragmen gerabah dan tengkorak diperlakukan (Malessy, 2000; Sudarmika, 2001).

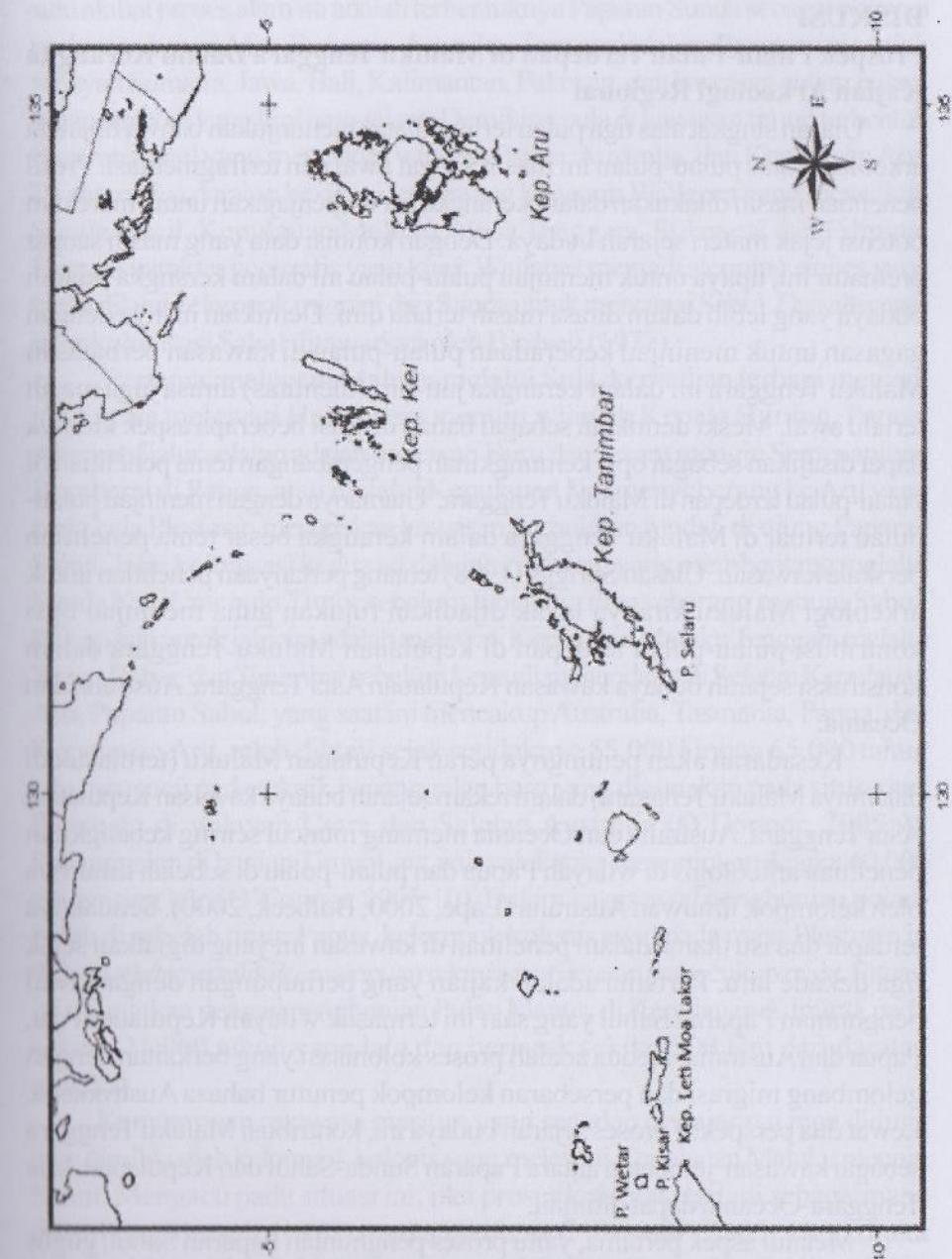
Leti Moa Lakor

Dalam gugus kepulauan Leti, Moa, Lakor, memang Leti yang termasuk dalam daftar pulau terluar. Namun mempertimbang jarak antar pulau yang cukup berdekatan, lebih tepat kiranya jika pulau ini ditinjau dalam perspektif gugus kepulauan induknya. Secara administrative kepulauan Leti Moa Lakor termasuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya. Di antara ketiga pulau ini, adalah Lakor dan Moa yang telah disurvei secara eksploratif oleh Tim Penelitian Balai Arkeologi Ambon (Sudarmika, 2001). Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun itu, merekam keberadaan pemukiman tradisional yang kental dengan karakter khas pemukiman tradisional di Kepulauan Maluku Tenggara. Penanda khas pemukiman tradisional di Kepulauan Maluku Tenggara, khususnya di pulau-pulau bagian barat, salah satunya adalah keberadaan tembok keliling yang dikonstruksi dari susunan batu. Karakter lainnya adalah rencana ruang yang mengadopsi tema perahu sebagai cetak

biru (Ririmasse, 2008; Ririmasse 2010). Dalam konsep ini pemukiman dipandang sebagai perahu dan struktur sosial komunitas di dalamnya ditandai dengan peran-peran spesifik sebagaimana peran awak dalam sebuah perahu. Belum ada rekam kronologis untuk kepulauan ini, namun karakter khas pemukimannya kiranya merupakan peluang tema penelitian berskala kawasan.

Selaru

Pulau Selaru secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Meski terdaftar sebagai salah satu pulau terluar, pulau ini masih relatif mudah dijangkau dari Saumlaki sebagai kota kabupaten. Survei eksploratif di Pulau ini, dilakukan oleh Balai Arkeologi Ambon pada tahun 2006 dan difokuskan di wilayah Lingat dan sekitarnya (Ririmasse , 2007). Dalam penelitian ini berhasil direkam beberapa situs bekas pemukiman kuna diantaranya situs *negeri enus* serta temuan artefaktual berupa fragmen Moko. Karakter situs ini kiranya mirip dengan situs pemukiman di Kepulauan Maluku Tenggara: berada di lahan yang lebih tinggi dari kawasan sekitarnya dan memiliki ‘tembok’ keliling. Karakter khas lainnya pada situs ini adalah keberadaan himpunan tengkorak yang disisipkan pada relung-relung cadas di salah satu sisi pemukiman. Kronologi atas situs-situs sejenis di Pulau ini juga masih kabur karena belum dilakukan ekskavasi. Bila menilik data sejarah, agaknya pemukiman-pemukiman semacam ini mulai ditinggalkan di awal abad ke-20 menyusul kebijakan pemerintah kolonial yang mendorong relokasi pemukiman di Kepulauan Maluku Tenggara, dari wilayah dataran tinggi ke kawasan pesisir yang mudah ditinjau.



Gambar.1 Peta Kepulauan Maluku Tenggara dengan pulau-pulau terdepan yang disebutkan di dalam teks

DISKUSI

Prospek Pulau-Pulau Terdepan di Maluku Tenggara Dalam Kerangka Kajian Arkeologi Regional

Ulasan singkat atas tiga pulau terluar diatas menunjukan bahwa tinjauan arkeologis atas pulau-pulau ini masih sangat awal dan terfragmentasi. Profil penelitian masih dilakukan dalam kerangka survei penjajakan untuk merekam potensi jejak materi sejarah budaya. Dengan kondisi data yang masih sangat prematur ini, upaya untuk meninjau pulau-pulau ini dalam kerangka sejarah budaya yang lebih dalam dirasa masih terlalu dini. Demikian halnya dengan gagasan untuk meninjau keberadaan pulau-pulau di kawasan perbatasan Maluku Tenggara ini dalam kerangka jati-diri (identitas) dirasa juga masih terlalu awal. Meski demikian sebagai bahan diskusi beberapa aspek kiranya dapat disajikan sebagai opsi kemungkinan pengembangan tema penelitian di pulau-pulau terdepan di Maluku Tenggara. Utamanya dengan meninjau pulau-pulau terluar di Maluku Tenggara dalam kerangka besar tema penelitian berskala kawasan. Ulasan Spriggs (1998) tentang pertanyaan penelitian untuk arkeologi Maluku kiranya layak dijadikan rujukan guna meninjau opsi kontribusi pulau-pulau terdepan di kepulauan Maluku Tenggara dalam konstruksi sejarah budaya kawasan Kepulauan Asia Tenggara, Australia dan Oceania.

Kesadaran akan pentingnya peran Kepulauan Maluku (termasuk di dalamnya Maluku Tenggara) dalam rekam sejarah budaya kawasan Kepulauan Asia Tenggara, Australia dan Oceania memang muncul seiring kebangkitan penelitian arkeologis di wilayah Papua dan pulau-pulau di sebelah timurnya oleh kelompok ilmuwan Australia (Lape, 2000; Bulbeck, 2000). Setidaknya terdapat dua isu utama dalam penelitian di kawasan ini yang digiatkan sejak tiga dekade lalu. Pertama adalah kajian yang berhubungan dengan awal penghunian Paparan Sahul yang saat ini termasuk wilayah Kepulauan Aru, Papua dan Australia. Kedua adalah proses koloniasi yang berkaitan dengan gelombang migrasi dan persebaran kelompok penutur bahasa Austronesia. Lewat dua perspektif proses sejarah budaya ini, kontribusi Maluku Tenggara sebagai kawasan jembatan antara Paparan Sunda-Sahul dan Kepulauan Asia Tenggara-Oceania dapat ditinjau.

Melalui aspek pertama, yaitu proses penghunian Paparan Sahul, gugus Kepulauan Maluku Tenggara, diperkirakan menjadi salah satu alternatif jalur migrasi yang dilewati kolonis dari Paparan Sunda sebagaimana diusulkan Birdsell (1977). Kondisi lingkungan pada kala Pleistosin dicirikan dengan terjadinya proses glasial yang membuat muka air laut surut maksimum. Salah

satu akibat proses alam ini adalah terbentuknya Paparan Sunda sebagai wilayah perluasan benua Afro-Euroasia-Amerika. Termasuk dalam Paparan ini adalah wilayah Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Palawan, dan kawasan antara pulau-pulau tersebut yang kini tenggelam. Demikian pula di kawasan timur, terbentuk Paparan Sahul yang mencakup wilayah Papua, Australia, dan Kepulauan Aru. Di antara dua daratan besar ini terbentang kawasan Wallacea yang mencakup Sunda Kecil, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Filipina. Dengan karakter geografis yang khas, Wallacea menjadi stepping stones yang harus dilalui kelompok migrant dari Sunda untuk mencapai Sahul. Dua alternatif jalur kolonisasi Sahul ditawarkan oleh Birdsell (1977).

Pertama, melewati Maluku melalui Sula, kemudian terbagi menjadi jalur utara melewati Halmahera menuju wilayah Kepala Burung, Papua. Alternatif jalur selatan adalah melewati Buru dan Seram menuju Semenanjung Bomberai di Papua, atau melalui Kepulauan Kei menyeberang ke Aru yang pada kala Pleistosin merupakan kawasan perbukitan rendah di ujung Paparan Sahul. Jalur kolonisasi kedua adalah jalur selatan, yang membentang melalui Sunda Kecil, menuju Timor sebelum langsung menyeberang menuju Sahul. Pilihan lain untuk jalur ini adalah melewati Kepulauan Maluku Tenggara melalui Wetar, Babar, dan Tanimbar sebelum kemudian mendarat di Selatan Kepulauan Aru. Paparan Sahul, yang saat ini mencakup Australia, Tasmania, Papua, dan Kepulauan Aru, telah dihuni sejak setidaknya 55.000 hingga 65.000 tahun lalu mengacu pada teknik penanggalan baru yang digunakan pada situs-situs Pleistosin di wilayah Utara dan Selatan Australia (O'Connor, 2005:9). Penanggalan di bagian Timur Laut wilayah Papua menunjukkan Angka 40.000 tahun yang lalu (O'Connor, 2005:10). Dalam kasus awal penghunian pulau-pulau di sebelah timur Papua, kelompok kolonis awal pada masa Pleistosin ini diduga telah memiliki kemampuan rekayasa pelayaran yang cukup maju. Situasi ini ditunjukkan dengan penghunian Pulau Manus, di Kepulauan Admiral, pada sekitar 21.000 tahun yang lalu dan berjarak sekitar 200 Km dari daratan terdekat.

Kemampuan rekayasa maritim yang sepadan sewajarnya juga diduga juga dimiliki oleh kelompok kolonis yang melewati Kepulauan Maluku menuju Sahul. Mengacu pada situasi ini, jika proses koloniasi terjadi sebagaimana diusulkan Birdsell (1977), maka menurut O'Connor (2005: 10)terbuka kemungkinan sejarah 55.000 tahun yang lalu di beberapa bagian Kepulauan Maluku yang menjadi bagian dari jalur migrasi kala Pleistosin. Adalah dalam konteks inilah beberapa pulau terdepan di wilayah Maluku Tenggara dapat ditinjau. Utamanya bila mempertimbangkan bahwa kemungkinan bahwa proses

kolonisasi melalui jalur selatan, melewati pulau-pulau seperti Wetar, Babar, dan Kepulauan Tanimbar. Rekam penelitian arkeologi telah cukup intens dilakukan di kawasan pulau-pulau sebelah baratnya (termasuk Timor dan Flores) dan sebelah timurnya (Aru). Kajian atas kemungkinan peran pulau-pulau diantaranya, termasuk di dalamnya beberapa pulau-pulau terluar seperti, Wetar, Kisar, dan Babar pada kala Pleistosin masih sama sekali nihil.

Aspek yang kedua, berkaitan dengan peran kepulauan Maluku Tenggara dari proses migrasi penutur bahasa Austronesia. Model ‘Out of Taiwan’ hingga saat ini masih menjadi rujukan utama dalam menjelaskan proses migrasi penutur bahasa Austronesia yang dipandang menjadi pemicu budaya Neolitik di Kepulauan Asia Tenggara (Tanudirdjo, 2005). Dalam perspektif ini, Bellwood berpendapat bahwa situs-situs Neolitik paling awal terdapat di Taiwan dan memiliki penanggalan antara 6000 hingga 5000 tahun lalu. Budaya ini kemudian menyebar ke kawasan Filipina, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur setelah 4000 tahun lalu (Bellwood, 1997:219; O’Connor, 2005: 13). Penanggalan tertua untuk situs Neolitik di Kepulauan Maluku sejauh ini hanya di Situs Uattamdi, Kayoa, Maluku Utara. Dengan karakter temuan yang berhubungan dengan Sulawesi, Bagian Timur Pulau Timor, dan Kepulauan Bismarck, Uattamdi merupakan satu-satunya situs gerabah masa Neolitik di kawasan ini. Gerabah yang ditemukan diberbagai situs lain di Maluku Utara berpenanggalan 2000 tahun lalu. Penanggalan untuk masa Neolitik di bagian lain Kepulauan Maluku ditemukan oleh Lape di Pulau Ay, Kepulauan Banda. Tulang mamalia yang digunakan sebagai sampel menunjukkan penanggalan sekitar 3200 tahun lalu dan berasosiasi dengan tulang babi dan ikan, obsidian, *chert*, gerabah poles merah dengan pola hias mirip gaya khas Lapita. Situs Neolitik belum ditemukan di pulau-pulau yang lebih ke selatan. Pulau-pulau di sebelah barat mulai dari Kei, Tanimbar, hingga Wetar, belum ditinjau dalam kerangka proses neolitisasi. Menilik keletakan pulau-pulau ini yang berada antara Banda dan Timor, dimana jejak Neolitik ditemukan dan populasi luas penutur bahasa Austronesia, kiranya masih terbuka kemungkinan ke arah sana.

Diluar kedua tema kolosal ini, interaksi dengan budaya Eropa kiranya merupakan salah satu tema yang juga potensial menjadi kerangka untuk meninjau pulau terdepan di Maluku Tenggara. Sebagai misal, data arkeologis pulau Kisar yang merekam jejak struktur dan bangunan kolonial merupakan pintu masuk untuk meninjau peran pulau ini dalam jaring perdagangan rempah-rempah dan komoditi eksotik di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Kontribusi pulau-pulau yang lebih utara seperti Banda pun ke timur seperti Aru dalam

sejarah perdagangan masa kolonial kiranya sudah cukup jelas. Peran pulau-pulau di bagian barat Maluku Tenggara, termasuk beberapa pulau terluar belum banyak diulas. Lebih jauh sudah dipahami bahwa kiprah Belanda di Kepulauan ini cukup minim hingga akhir abad ke-19. Meski demikian, dinamika di paruh kedua era kolonial ini kiranya dapat diperluas dengan meninjau kemungkinan-kemungkinan dampak interaksi antar komunitas beda bangsa ini terhadap karakter budaya setempat. Secara khusus dapat dicermati kebijakan pasifikasi atas Kepulauan Maluku Tenggara oleh pemerintah Hindia Belanda. Dampak kebijakan ini terutama terasa dalam pergeseran religi dari kepercayaan tradisional-lokal menjadi agama modern. Implikasi pergeseran ini dalam perspektif sejarah budaya (materi) kiranya belum banyak ditinjau. Aspek lain yang dapat diamati adalah kebijakan relokasi pemukiman dari dataran tinggi ke kawasan pesisir oleh pemerintah kolonial. Implikasi dari kebijakan ini adalah terjadinya pergeseran model pemukiman yang tadinya mengacu pada model tradisional dengan orientasi lahan tinggi-defensif menjadi pemukiman pesisir-terbuka. Dengan demikian opsi-opsi yang lebih luas untuk kajian atas bukti budaya hasil interaksi-akulturasi kolonial-lokal kiranya juga terbuka. Menyimak dinamika proses budaya yang terjadi dalam jarak seabad silam, data etnohistori yang masih dapat dijangkau secara luas dapatlah menjadi data pendukung untuk mempertegas kajian interaksi akhir masa kolonial di pulau-pulau terdepan Maluku Tenggara.

PENUTUP

Tinjauan singkat di atas kiranya hanya merupakan pengantar untuk menciptakan opsi kerangka pikir dalam meninjau kajian arkeologis atas pulau-pulau terdepan di Maluku Tenggara. Hal ini sejalan dengan kondisi selama satu dekade terakhir dimana kedaulatan wilayah menjadi salah satu isu kunci dalam kehidupan bernegara. Ragam insiden di wilayah perbatasan adalah refleksi atas dinamika tinggi kawasan ini. Pulau-pulau terdepan kiranya merupakan salah satu elemen sentral dalam upaya menciptakan profil batas negara yang kuat. Untuk itu, pengelolaan beragam aspek kawasan khusus ini sewajarnya dilaksanakan secara harmonis. Aspek pertahanan, komunikasi, dan ekonomi memang merupakan isu-isu kunci yang selalu dikedepankan dalam tinjauan atas pulau-pulau terdepan. Meski demikian, pengembangan aspek budaya kiranya perlu berjalan selaras dengan ragam aspek lain. Aktifitas penelitian arkeologi kiranya dapat dipandang sebagai salah satu wahana untuk mempertegas legalitas atas kedaulatan wilayah serta bagian dari upaya mengembangkan pulau-pulau terdepan.

Sembilan puluh dua (92) pulau tercatat sebagai pulau-pulau terdepan di Indonesia. Kepulauan Maluku Tenggara menjadi rumah bagi 18 pulau terdepan dari daftar tersebut. Meski baru pada tahap awal, penelitian arkeologi telah dilaksanakan di beberapa pulau dari himpunan pulau-pulau di wilayah perbatasan ini. Kisar, Leti, Moa, dan Selaru adalah beberapa yang dapat disebut. Prospek pengembangan ke depan kiranya masih sangat terbuka. Utamanya dengan mempertimbangkan pengembangan tema dalam skala kawasan: *Pertama*, kontribusi pulau-pulau terdepan ini sebagai bagian dari Kepulauan Maluku Tenggara yang menjadi salah satu kemungkinan wilayah jembatan antara Paparan Sunda dan Sahul. *Kedua*, kontribusi pulau-pulau terdepan di kawasan ini melalui kerangka peran Kepulauan Maluku Tenggara dalam isu migrasi penutur bahasa Austronesia. *Ketiga*, Dinamika sosial pada masa pra-kolonial dan dampak interaksi antar komunitas dalam masa kolonial terhadap karakter sejarah budaya Kepulauan Maluku Tenggara. Tentu tema-tema ini masih dapat diperluas pun dipertajam mengacu pada minat pelaku penelitian. Salah satunya adalah dengan mengemas ragam pengetahuan sejarah budaya pulau-pulau terdepan ini dalam konteks muatan lokal. Representasi tema-tema domestik pulau-pulau terdepan dalam konstruksi sejarah lokal-nasional kiranya akan mempertegas rasa menjadi bagian bangsa. Menutup makalah singkat ini, pengalaman perjalanan mantan menteri Kelautan dan Perikanan, Sarwono Kusumaatmaja rasanya layak dikutip, sebagai refleksi bersama atas wajah pengelolaan pulau-pulau terdepan di Indonesia: *Saat masih menjabat ia berkunjung ke sebuah pulau di Kalimantan Barat. Seorang bapak tua di sana mengaku tidak tahu nama gubernurnya. Presiden yang ia kenal pun Soekarno. Namun, ia kenal baik nama-nama nakhoda kapal nelayan Thailand berikut nomor lambung kapalnya karena sering mengangkut warga yang sakit* (Aryanto, 2009).

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanto, Gesit. 193 Titik Dasar, 92 Pulau Terluar dalam *Kompas* 7 November 2009
- Ballard, C. 1988. Dudumahan: a rock art site on Kai Kecil, Southeast Mollucas. *Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association*, 8, Canberra: Australia National University pp. 139-161.
- Birdsell, J.B. (1977). The recalibration of a paradigm for the first peopling of Greater Australia, in J .Allen, J Golson, and R. Jones (eds.) *Sunda and Sahul*, p . 113-167 .
- Bullbeck, D. 2000. A Historical perspective on the Australian contribution to the practice of archaeology in Southeast Asia. *Australian Archaeology* No. 50.
- De Jonge, N and van Dijk, T. 1995. *Forgotten Islands of Indonesia: The Art and Culture of the Southeast Mollucas*. Singapore: Periplus.
- Fox, J.J. 2000. Maritime communities in the Timor and Arafura region: some historical and anthropological perspective. In *East of Wallace's Line: Modern Quaternary Research in Southeast Asia*. (eds O'Connor, S and Veth, P). A.A Balkema, Rotterdam, pp. 337-356.
- Lape, P.V. 2000a. Contact and Conflict in the Banda Islands, Eastern Indonesia, 11th to 17th Centuries. Unpublished PhD thesis, Brown University, Rhode Island.
- Lape, P.V. 2000b. Political dynamics and religious change in the late pre-colonial Banda Islands, Eastern Indonesia. *World Archaeology* 32 (1). London: Routledge pp. 138–55.
- Le Bar, F.M. 1976. *Insular Southeast Asia: Ethnographic Studies*. Connecticut: New Haven.

Malessy, E. 2000. *Laporan Penelitian Arkeologi Kolonial Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kab. Maluku Tenggara Barat.* Tidak diterbitkan. Ambon: Balai Arkeologi Ambon.

Retraubun, Alex. Mengapa Terluar bukan Terdepan. Dalam *Kompas* 20 September 2006.

Ririmasse, M. 2005. Jejak dan Prospek Penelitian Arkeologi di Maluku. Dalam *Kapata Arkeologi Volume 1 No. 1.* Ambon: Balai Arkeologi Ambon.

Ririmasse, M. 2006. Aspek-Aspek Kronologi Arkeologi Kolonial di Pulau Kisar. Dalam *Berita Penelitian Arkeologi Volume 2 No. 1.* Ambon: Balai Arkeologi Ambon.

Ririmasse, M. 2007. Penelitian Arkeologi di Desa Lingat Pulau Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dalam *Berita Penelitian Arkeologi Volume 3 No. 4.* Ambon: Balai Arkeologi Ambon.

Ririmasse, M. 2007. Fragmen Moko dari Selaru: Temuan Baru Artefak Logam di Maluku. Dalam *Berita Penelitian Arkeologi Volume 3 No. 5.* Ambon: Balai Arkeologi Ambon.

Ririmasse, M. 2008. Visualisasi tema perahu dalam rekayasa situs arkeologi di Maluku. Dalam *Naditira Widya Volume 2 No. 1.* Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin.

Ririmasse, M. 2010. Boat Symbolism and Identity in the Insular Southeast Asia: A Case Study from the Southeast Moluccas. *Tesis Pascasarjana.* Tidak diterbitkan. Leiden: Rijkuniversiteit Leiden.

Spriggs, M. 1998b. Research questions in Maluku archaeology. dalam *Cakalele 9:* 49-62.

O'Connor, S., Spriggs, M. Veth, P. 2005. The Aru Island in Perspective dalam O'Connor, Sue et.al. *The Archaeology of the Aru Island.* Canberra: Pandanus Books.

Spriggs, M. & D. Miller. 1988. A previously unreported bronze kettledrum from the Kai Islands, eastern Indonesia. *Indo-Pacific Prehistory Association Bulletin 8.* Canberra: Australia National University. pp.79-88.

Sudarmika, G.M. 2001. *Laporan Penelitian Arkeologi di Pulau Lakor Kecamatan Lemola Maluku Tenggara Barat.* Tidak diterbitkan. Ambon: Balai Arkeologi Ambon.

Sudarmika, G.M. 2001. *Laporan Penelitian Arkeologi di Pulau Leti Kecamatan Lemola Maluku Tenggara Barat.* Tidak diterbitkan. Ambon: Balai Arkeologi Ambon.

Tanudirdjo, D. 2005. The dispersal of Austronesian-speaking people and the ethnogenesis of Indonesian people. In *Austronesian Diaspora and the Ethnogeneses of People in Indonesian Archipelago.* Jakarta: LIPI Press

Zuhdi, Susanto. Mengapa Bukan Pulau Terdepan dalam *Kompas* 8 September 2006